

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Pajak adalah iuran rakyat kepada negara yang telah diatur oleh undang-undang perpajakan yang dipaksakan dan digunakan untuk membayar pengeluaran negara. Pajak memiliki sifat yang memaksa, sehingga dapat memberikan suatu beban tersendiri kepada penanggungnya. Pajak merupakan beban yang mengurangi keuntungan perusahaan, dan berbeda dengan tujuan semua perusahaan yaitu ingin memiliki laba sebesar mungkin (Wibawa *et al*, 2016). Bagi negara pajak merupakan penerimaan negara yang sangat penting karena memberikan kontribusi yang besar terhadap negara. Akan tetapi bagi perusahaan pajak adalah beban yang merugikan perusahaan karena menjadi pengurang keuntungan perusahaan, sehingga banyak perusahaan berusaha untuk memperkecil beban pajak perusahaan mereka agar keuntungannya tidak berkurang.

Salah satu cara untuk memperkecil beban pajak perusahaan yaitu dengan mengurangi beban pajak yang dibayarkan perusahaan secara “legal” dengan memanfaatkan celah yang terdapat di dalam peraturan perpajakan. Meminimalkan beban pajak yang dilakukan secara “legal” ini disebut dengan *tax avoidance*. *Tax avoidance* merupakan suatu strategi pajak yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengurangi beban pajak perusahaan (Annisa dan Kurniasih, 2012). Perilaku *tax avoidance* yang dilakukan suatu entitas memang di satu sisi menguntungkan bagi perusahaan tersebut namun

disamping itu juga menimbulkan kerugian bagi negara karena menyebabkan penghasilan negara menjadi berkurang (Jessica dan Toly, 2014).

Realisasi penerimaan pajak pada tahun 2016 mencapai Rp. 1.1405 triliun atau 81,54% dari target penerimaan pajak sebesar Rp. 1.355 triliun, pada tahun 2015 mencapai Rp. 1.055 triliun atau 81,5% dari target penerimaan pajak sebesar Rp. 1.294,25 triliun, dan pada tahun 2014 mencapai Rp. 981,9 triliun atau 91,5% dari target penerimaan pajak sebesar Rp. 1.072 triliun (www.pajak.go.id). Data tersebut dapat memberikan arti bahwa masih ada wajib pajak yang belum taat dalam pemenuhan kewajiban pajaknya.

Pemenuhan kewajiban perpajakan dalam perusahaan salah satunya dipengaruhi oleh *Corporate Governance* (Rahmawati *et al*, 2016). *Corporate governance* adalah suatu sistem dan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, dewan komisaris, dan dewan direksi agar kinerja perusahaan dijalankan dengan efektif, efisien, transparan dan akuntabel demi tercapainya tujuan organisasi, selain itu juga dapat menghasilkan laporan keuangan yang akuntabel yang berguna bagi para penggunanya untuk mengambil keputusan. Usaha menghindari beban pajak perusahaan melalui manajemen pajak merupakan salah satu keputusan strategis perusahaan yang dapat dipengaruhi oleh *corporate governance* (Santoso, 2014).

*Corporate governance* mengatur agar tata kelola perusahaan dalam hal perpajakan tetap berada dalam koridor penghindaran pajak bukan penggelapan pajak (Permana, 2015). Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang

menjelaskan hubungan antara beberapa mekanisme kontrol *corporate governance* terhadap penghindaran pajak perusahaan. Penelitian Zulkarnaen (2015) menyatakan bahwa Peningkatan komisaris independen akan meningkatkan kinerja perusahaan menjadi semakin efektif, sehingga perusahaan akan melakukan hal-hal yang dianggap penting termasuk dalam hal yang berkaitan dengan pajak. Proporsi komisaris independen yang lebih tinggi akan memungkinkan mereka memastikan bahwa tindakan manajemen telah sesuai dengan kepentingan pemegang saham yaitu melakukan manajemen pajak sehingga hutang pajak yang ditanggung perusahaan menjadi rendah.

Komite audit dalam perusahaan dapat mempengaruhi praktik penghindaran pajak (Wibawa *et al*, 2016). Tinggi atau rendahnya variasi penghindaran pajak (*tax avoidance*) ditentukan oleh Komite Audit. Dengan kata lain, Apabila jumlah anggota Komite Audit di perusahaan bsnyk maka akan tindakan *tax avoidance* semakin rendah. Namun sebaliknya, apabila jumlah anggota Komite Audit sedikit maka tindakan *tax avoidance* semakin tinggi (Sandy dan Lukviarman, 2015). Pohan (2008) dalam Winata (2014) menyatakan bahwa semakin rendah keberadaan komite audit dalam perusahaan akan menurunkan kualitas *good corporate governance* di dalam perusahaan, sehingga akan memperbesar kemungkinan praktik penghindaran pajak yang dilakukan.

Salah satu elemen penting dalam *corporate governance* adalah transparansi. Transparansi mensyaratkan adanya pengungkapan yang akurat tentang laporan keuangan yang telah diaudit oleh KAP (Maraya, 2016). Laporan keuangan

yang diaudit oleh KAP *Big Four* memiliki tingkat kecurangan lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan yang diaudit oleh KAP *Non-Big Four*. Apabila kualitas audit baik, maka tindakan *tax avoidance* semakin kecil karena laporan keuangan yang memiliki kualitas audit yang baik akan bebas dari kecurangan (Annisa dan Kurniasih, 2012)

Salah satu isu tentang *corporate governance* adalah struktur kepemilikan atau kontrol dari perusahaan. Struktur kepemilikan merupakan jenis institusi atau perusahaan yang memegang saham terbesar dalam suatu perusahaan (Wahyudi dan Pawestri, 2006). Struktur kepemilikan di Indonesia memiliki karakteristik yang berbeda dari perusahaan-perusahaan di Negara lain. Sebagian besar perusahaan di Indonesia kepemilikan sahamnya adalah terkonsentrasi sehingga pendiri juga dapat duduk sebagai dewan direksi atau komisaris (Wiranata dan Nugrahanti, 2013). Struktur kepemilikan dalam penelitian ini menekankan pada adanya konsentrasi kepemilikan saham.

Kepemilikan terkonsentrasi adalah perusahaan publik yang dimiliki sebagian besar oleh pihak tertentu. Pihak tersebut dapat merupakan individu, keluarga, institusi, negara, atau asing (Hadi dan Mangoting, 2014). Pada negara yang perlindungan investornya rendah dan tingkat korupsinya cukup tinggi maka struktur kepemilikan akan cenderung terkonsentrasi dan tingkat penghindaran pajaknya juga tinggi. Perusahaan melindungi diri dengan memperluas kepemilikan sahamnya yang berakibat pada usaha untuk melakukan tindakan penghindaran pajak (Utthavi, 2015).

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas. Maka perumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Apakah komisaris independen berpengaruh terhadap tindakan *tax avoidance*?
2. Apakah komite audit berpengaruh terhadap tindakan *tax avoidance*?
3. Apakah kualitas audit berpengaruh terhadap tindakan *tax avoidance*?
4. Apakah kepemilikan saham terkonsentrasi berpengaruh terhadap tindakan *tax avoidance*?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun diatas, tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji secara empiris pengaruh dewan komisaris independen terhadap *tax avoidance*.
2. Untuk menguji secara empiris pengaruh komite audit terhadap *tax avoidance*.
3. Untuk menguji secara empiris pengaruh kualitas audit terhadap *tax avoidance*.
4. Untuk menguji secara empiris pengaruh struktur kepemilikan saham terkonsentrasi terhadap *tax avoidance*.

## 1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain:

1. Dalam bidang akademik, diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan, mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang perpajakan dan dapat menjadi landasan atau bahan informasi untuk penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan pengaruh *corporate governance* dan struktur kepemilikan perusahaan terhadap tingkat *tax avoidance* di Indonesia.
2. Bagi Direktorat Jenderal Pajak, diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan dan sumbangan pemikiran serta sebagai sumber informasi dalam upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak guna meningkatkan penerimaan dari sektor pajak pemahaman mengenai pengaruh komisaris independen, komite audit, kualitas audit dan kepemilikan saham terkonsentrasi terhadap *tax avoidance* diharapkan mampu memberikan masukan informasi dalam penyusunan peraturan perpajakan yang mengatur wajib pajak dalam kaitannya dengan *corporate governance*.
3. Bagi kajian penelitian berikutnya, hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan kajian untuk penelitian mengenai perilaku penghindaran pajak perusahaan berikutnya, khususnya di Indonesia.